



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

*Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024
Guna Mendukung SDG'S Indonesia 2045*

**Edisi 1
Desember 2019**

**Penerbit
STIE BANK BPD JATENG**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)

2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024

Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”



Penerbit

STIE Bank BPD Jateng

Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,

Kota Semarang (50196)

stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)
2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”

ISBN

9786027436725

Editor

Fika Azmi, SE, M.Si

Tebal Buku

574 Halaman

Edisi

Satu, Desember 2019

Publikasi Online

stiebankbpdjateng.ac.id/saf

Penerbit

STIE Bank BPD Jateng
Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,
Kota Semarang (50196)
stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

PANITIA PELAKSANA

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF) 2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”

Penasehat	:	Dr. E. Siti Puryandani, SE, M.Si.
Steering Committee	:	1. Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC. 2. Mekani Vestari, SE, M.Si, Ak.,CA. 3. Himawan Arif Sutanto, SE, M.Si.
Ketua	:	Nugroho Heri Pramono, SE, M.Si.
Sekretaris	:	Suci Atiningsih, S.Pd, M.Si.
Bendahara	:	Khairina Nur Izzaty, SE, M.Si, Ak.
Sie Acara & Protokoler	:	Taufik Andre Setiyono, SE, M.Ak.
Sie Artikel	:	Fika Azmi, SE, M.Si.
Sie Humas	:	Pratomo Cahyo Kurniawan, SE, M.Ak.

Reviewer

Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC.
Dr. Grace Tianna Solovida, SE, M.Si, Ak, CA
Ali Mursid, P.hD

Editor

Fika Azmi, SE, M.Si

Penerbit

STIE Bank BPD Jateng
Jalan Arteri Soekarno Hatta No 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,
Kota Semarang (50196)
stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
PANITIA PELAKSANA	iv
DAFTAR ISI	v

A. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN I

1. PENGARUH *CURRENT RATIO* (CR), *RETURN ON EQUITY* (ROE), *DEBT TO EQUITY* (DER), & *NET PROFIT MARGIN* (NRM) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN
(Ika Agustina N. & Suyatmin Waskito A.) 1 - 25
2. KENAIKAN HARGA ROKOK TERHADAP KONSUMSI ROKOK DI KOTA SEMARANG
(Penta Widyartati, Ariyani Indriastuti, & Ira Setiawati) 26 - 35
3. ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, *FIRM SIZE*, *MEDIA EXPOSURE*, *LEVERAGE*, & UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP *CSR DISCLOSURE*
(Nursiam & Shinta Dwi Rahayu) 36 - 45
4. PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, & PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Alfiyatul Maziyah & lin Indarti)..... 46 - 59
5. PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *DEBT TO EQUITY RATIO*, *CURRENT RATIO*, ARUS KAS OPERASI, & PERTUMBUHAN PENJULAN TERHADAP RETURN SAHAM
(Nursiam & Silmi Agustin) 60 - 70
6. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *AUDIT FEE* & KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018)
(Titik Purwanti, Nawang Kalbuana, & Fiqi Rahmawati) 71 - 85
7. *FINANCIAL RISK DISCLOSURE* & TATA KELOLA PERUSAHAAN KEUANGAN PERIODE 2016-2018
(Shinta Permata Sari & Himmatus Sholikhah) 86 - 99

B. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN II

1. PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL BANK, JUMLAH KANTOR CABANG, TINGKAT SUKU BUNGA & JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP JUMLAH KREDIT UMKM BANK BUMN
(Ade Onny Siagian)..... 100 - 127
2. PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI KUALITAS PELAYANAN FISKUS (STUDI PADA WPOP YANG MEMPUNYAI USAHA & BADAN KPP PRATAMA CANDISARI KOTA SEMARANG
(Mohklas) 128 - 137
3. PENGARUH LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, & *LEVERAGE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Athaya Salsabila & Rina Trisnawati)..... 138 - 158

4. PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO RETENSI SENDIRI, RASIO BEBAN IKLAN, & *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
(Dwi Wahyu Pujiharjo)..... 159 - 176
5. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2017
(Wima Nurhidayanto) 177 - 189

C. SUB TEMA: AKUNTANSI & CORPORATE GOVERNANCE

1. *CORPORATE GOVERNANCE & CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*: TINJAUAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Shinta Permata Sari & Agustina Maya Sari) 190 - 202
2. PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR LISTING & *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR *FOOD & BEVERAGE* YANG TERDAFTAR PADA PERUSAHAAN DI BEI PERIODE 2014-2017)
(Mela Susmawati) 203 - 218
3. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45 TAHUN 2014-2018)
(Benny Kurnianto, Nawang Kalbuana, & Umi Rianesa Rusiati) 219 - 232
4. PENGARUH RUANG FISKAL, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, & DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
(Putriana Indah Budi Astuti & Andi Dwi Bayu Bawono)..... 233 - 269
5. PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROFITABILITAS
(Nindya Ardita Nur Amni, Dwi Intan Susiloningrum, & Iin Indarti)..... 270 - 285
6. ANALISIS PENGARUH *FEE BASED INCOME*, PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA, UKURAN PERUSAHAAN, & KONDISI EKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS BANK
(Jihan Okti Amaliah & Widhy Setyowati) 286 - 303
7. PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, & KONTROL PERILAKU TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK HOTEL, RESTORAN, & HIBURAN DI KOTA TEGAL)
(Asrofi Langgeng N. & Ibnun Aslamadin) 304 - 318
8. ANALISIS KEUANGAN & NON KEUANGAN CALON DEBITUR TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERIAN KREDIT PADA PD BPR BKK PURBALINGGA
(Anggita Ratnaningtyas & Widhy Setyowati)..... 319 - 332
9. PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL & PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN INVESTASI SWASTA SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Febri Rachmawati & Rina Trisnawati)..... 333 - 349

10. PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL & TRANSPARANSI INFORMASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Fitria Ulfa & Suci Atiningsih) 350 - 358

D. SUB TEMA: AKUNTANSI SYARIAH

1. PENGARUH *SHARIA CONFORMITY & ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH (Rusmiyatun & Nur Edi Cahyono) 359 - 376
2. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BNI CABANG SYARIAH SEMARANG (Siti Hasanah, Suryani Sri Lestari, Siti Mutmainah, & Iwan Budiyo) 377 - 387
3. PERKEMBANGAN, TANTANGAN, & PERAN *SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS)* DI PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Muhammad Andryzal Fajar) 388 - 400
4. KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA *JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)* PERIODE TAHUN 2016-2018 (Suryakusuma Kholid H & Siti Puryandani) 401 - 409
5. MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL SEJAHTERA MANDIRI (Erika Zunita Cahyani & Fika Azmi) 410 - 421

E. SUB TEMA: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PERSENTASE KEMISKINAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA FUNGSI EKONOMI DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2018) (Ayustika Isminanda & Andy Dwi Bayu Bawono) 422 - 443
2. PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, *FREE CASH FLOW*, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN (Fachriyatul Millah & Mekani Vestari) 444 - 459
3. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PERSENTASE KEMISKINAN TERHADAP BELANJA FUNGSI KESEHATAN DI INDONESIA (Ina Sari Darmastuti & Andy Dwi Bayu Bawono) 460 - 477
4. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK & KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Wa Ode Aprisilia Zahratul Aziz & Muhammad Yusuf) 478 - 493
5. PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, & *JOB RELEVANT INFORMATION* TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN (Yustinus Hutama Marianus & Suci Atiningsih) 494 - 506

F. SUB TEMA: TOPIK LAIN YANG RELEVAN

1. PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGALAMAN KEUANGAN, & SIKAP MONETER KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN KEPEMILIKAN ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PANCORAN MAS DEPOK
(Syahvira Septiarizk & Nurhidayati Dwiningsih) 507 - 522
2. ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP KINERJA SDM (STUDI EMPIRIK PADA PT. ADJITAMA PERSADA JAKARTA)
(Biatmoko Agung Nugroho, Endah Winarti HS, & Harnoto) 523 - 536
3. APAKAH *CELEBRITY ENDORSEMENT* PRODUK HALAL DAN CITRA MEREK BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN *SKIN CARE* SAFI?
(Desi Tya Astuti & Francy Iriani) 537 - 549
4. PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL & KETERLIBATAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL
(Kertati Sumekar, Sri Mulyani, & Zulfa Deviga Octaviana) 550 - 564
5. PRODUK HALAL DAN MINAT BELI KONSUMEN
(Budi Suryowati & Irpiani)..... 565 - 574

Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Investasi Swasta Sebagai Variabel Moderating

Febri Rachmawati¹, Rina Trisnawati²

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

email: febriachmawati84@gmail.com

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

email: rina.trisnawati@ums.ac.id

Abstract

*Economic Growth is one indicator to measure the success of a country's economic development. This study aims to determine the effect of Fiscal Decentralization and Regional Original Income on Economic Growth with Private Investment as a moderating variable. The population used was 105 regencies/cities in Central Java Province in 2015-2017 and the samples in this study were selected using a purposive sampling method so that 102 regencies/cities were obtained as samples. The analytical method used is Moderated Regression Analysis (MRA), *t* test, *F* test, and coefficient of determination analysis (R^2). Based on the results of the analysis that has been carried out this study shows that simultaneously the variable Fiscal Decentralization, Regional Original Income and Private Investment significantly on Economic Growth. While the partial analysis results of the Fiscal Decentralization variable did not affect the Economic Growth and the Regional Original Revenue variable had a significant positive effect on Economic Growth, and the Private Investment variable was not able to moderate the influence of Fiscal Decentralization and Regional Original Revenue to Economic Growth.*

Keywords: Economic Growth, Fiscal Decentralization, Regional Original Revenue, Private Investment.

Abstrak

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Investasi Swasta sebagai variabel moderating. Populasi yang digunakan adalah 105 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 dan sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga sebanyak 102 Kabupaten/Kota diperoleh sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA), uji *t*, uji *F*, dan analisis koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah dan Investasi Swasta berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan hasil analisis secara parsial variabel Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta variabel Investasi Swasta tidak mampu memoderasi pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Investasi Swasta.

1. Pendahuluan

Problematika ekonomi yang terjadi di negara Indonesia sebagai negara berkembang merupakan suatu tantangan yang harus diatasi dengan seksama. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang karena peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran keberhasilan suatu negara yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Ernita, 2013). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan *Gross National Product* (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat (Murni, 2006 : 173). Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi tentu tidak akan terlepas dari peran daerah sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah dimana mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian (Febry, et al., 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberi keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dalam sistem otonomi daerah, ada tiga prinsip menurut UU No. 23 Tahun 2014 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih memmeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah dalam mengembangkan menurut potensi masing-masing. Menurut Saragih (2003:74), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut Susanti (2008:85) dalam Mukthar (2015) dengan adanya desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal pemerintah untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain.

Keberhasilan desentralisasi fiskal dapat diukur dari parameter penerimaan dan pengeluaran masing-masing pemerintah daerah Khusaini (2006). Sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan parameter sisi pengeluaran. Hal ini dikarenakan sisi pengeluaran yaitu belanja riil yang telah dilakukan oleh pemerintah diyakini akan mampu menjelaskan pengaruhnya secara lebih baik dibanding sisi penerimaan (Sasana, 2015). Selain itu, Malik (2007) berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam memungut pajak-pajak strategis dan kemudian mendistribusikannya kepada pemerintah daerah, sementara tanggung jawab pengeluaran diberikan kepada pemerintah daerah, maka sisi pengeluaran merupakan indikator derajat desentralisasi fiskal yang lebih baik dibandingkan dengan sisi pendapatan.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pembangunan suatu daerah salah satu sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan

kenaikan pendapatan asli daerah. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi (Arini S, 2019).

Investasi atau penanaman modal adalah komponen pembentuk nilai tambah nasional, yang merupakan pembelian barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Meningkatnya kegiatan perekonomian sangat tergantung pada aliran modal bagi usaha produktif (Sutawijaya, 2013). Investasi merupakan salah satu *engine of growth*, oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan investasi. Apabila suatu daerah memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka daerah tersebut dianggap merupakan daerah yang menjanjikan untuk ditanamkan investasi, karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi diiringi pula dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Arini S, 2019).

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah 2013-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Jateng, 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi tetapi tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,47% . Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,28%, dan untuk tahun 2017 masih stagnan di angka 5,27%. Berdasarkan data tersebut pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2017 berada posisi keempat penyumbang perekonomian Indonesia setelah Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh 3 faktor yaitu pertumbuhan ekspor, investasi dan konsumsi pemerintah.

Pada tahun 2017, Kota Semarang memimpin perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kota Semarang diukur atas dasar harga berlaku mencapai Rp 161,25 triliun atau 13,7% dari total PDRB Jawa Tengah yang mencapai Rp 1.176,5 triliun. Sedangkan Kota Magelang memiliki PDRB terendah, yakni hanya mencapai Rp 7,64 triliun atau 0,65%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kurang maksimalnya implementasi desentralisasi fiskal sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi regional (Sasana, 2015) serta perbedaan total investasi yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota, bahkan ada beberapa daerah yang tidak memiliki investasi, khususnya investasi swasta.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Namun

untuk variabel investasi swasta dijadikan sebagai moderasi belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian Sasana (2015), Kresnandra (2016) dan Kusuma (2016) menunjukkan hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian di luar Indonesia seperti di Pakistan yang dilakukan oleh Malik (2006), di Amerika Serikat oleh Akai (2007) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Yuskov (2015) terhadap beberapa wilayah di Rusia menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Young (2000), Lin dan Zou (2005) dan Saputra (2013) menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Yuskov (2015).

Penelitian Mukhtar (2015) Kurniawan (2017), Saraswati (2018) dan Jumasrah (2018) menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang sangat mempengaruhi karena sebagai pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara leluasa oleh daerah, sehingga pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemda setempat dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (Mukhtar, 2015).

Investasi swasta sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi belum banyak diteliti di Indonesia. Penelitian Kresnandra (2016) tentang desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dana perimbangan dan investasi swasta sebagai pemoderasi menunjukkan hasil bahwa investasi swasta tidak mampu memoderasi hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Saraswati (2018) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan investasi swasta dan belanja modal sebagai variabel moderasi, menunjukkan hasil bahwa investasi mampu memperkuat hubungan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Investasi Swasta Sebagai Variabel Moderating” dengan menggunakan obyek Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah dan moderasi investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis guna dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas bagi akademisi dan dapat memberikan informasi lanjutan dan dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya. Sedangkan untuk manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat mengelola wilayahnya guna dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Teori Agensi

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan telah dipraktikkan di organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah. Dalam sektor publik yang berperan sebagai agen adalah pemerintah daerah dan prinsipalnya adalah masyarakat yang diproyeksikan oleh DPRD. Kaitan teori keagenan dalam

penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penerapan desentralisasi fiskal dan juga hubungan antara masyarakat yang di proksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Hubungan keagenan diharapkan dapat menciptakan keselarasan tujuan antara prinsipal dan agen (Supriyono, 2016:63).

Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Hipotesis

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Adapun teori pertumbuhan yang mendasari penelitian ini antara lain:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ekonom klasik, Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2004). Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga yaitu sumber daya alam, sumber daya insani, dan stok modal (investasi).

2. Teori Harrod-Domar

Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes membahas mengenai persoalan ekonomi jangka pendek (kondisi statis) sedangkan teori Harrod-Domar membahas persoalan ekonomi jangka panjang (kondisi dinamis). Dalam menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady state* dalam jangka panjang (Maharani, 2014).

3. Teori Neoklasik

Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi (Taringan, 2004:50). Sebagai suatu perluasan dari teori Keynes, Teori Harrod-Domar melihat persoalan pertumbuhan dari segi permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya berlaku apabila pengeluaran agregate melalui kenaikan investasi bertambah terus menerus pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan (Maharani, 2014).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan *Gross National Product* (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat (Murni, 2006:173). Menurut Todaro (2004:92) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Sukirno (2004) menjelaskan bahwa dalam analisis makroekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki dua segi pengertian yang berbeda. Di satu pihak, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Di segi lain, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menggambarkan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara atau suatu wilayah dalam jangka panjang.

Desentralisasi Fiskal

Definisi desentralisasi menurut UU No. 32 tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Desentralisasi Fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Berdasarkan teori federalism fiskal, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dan digandakan kecepatannya dengan cara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah (desentralisasi) salah satunya adalah desentralisasi fiskal (Kresnandra, 2016).

Desentralisasi fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi dana. Desentralisasi fiskal tidak bisa diadopsi dan diterapkan begitu saja, namun perlu disesuaikan dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan, kondisi-kondisi lembaga, politik, dan ekonomi yang melekat pada negara itu. Studi teoritis telah menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal membantu meningkatkan kemampuan sektor publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena pemerintah daerah berada pada posisi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat untuk menyediakan layanan publik sesuai kebutuhan daerah (Yang, 2016).

Martinez dan McNab (2001) dalam Sasana (2016) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Semakin tinggi desentralisasi fiskal maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan dan hubungan yang positif antara lain Miyasto (2013) Kresnandra (2016), Sasana (2016), dan Anggarini (2017). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004:67).

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana seharusnya dapat ditingkatkan. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal yang bersumber dari daerah,

secara akumulasi seharusnya akan lebih menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Saraswati, 2018).

Menurut Saragih (2003:15) dalam Putra (2017) peningkatan pendapatan asli daerah merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif. Peningkatan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun sarana prasarana serta untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya dalam mensejahterakan rakyat merupakan salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara lain Mukhtar (2015), Saraswati (2018), Jumasrah (2018), dan Arini S. (2019). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Investasi Swasta

Investasi menurut Sukirno (2000) adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional serta meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Hukum investasi atau pasar modal di Indonesia, sudah diatur oleh pemerintah melalui UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat di bagi menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Teori yang dinyatakan oleh Jhingan (1999:291) dalam Gitaningtyas (2014) investasi memberikan peranan kunci terhadap kegiatan perekonomian suatu daerah khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan dan kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal sehingga akan memperbaiki kondisi perekonomian. Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Dengan arti kata besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai ditentukan juga oleh besarnya investasi yang dilakukan.

Desentralisasi fiskal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut Maharani (2014) dengan adanya desentralisasi fiskal sebagai wujud otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya. Investasi merupakan titik keberhasilan dan keberkelanjutan pembangunan di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah untuk membutuhkan tambahan modal dan investasi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Apabila suatu daerah memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka daerah tersebut dianggap merupakan daerah yang menjanjikan untuk ditanamkan investasi, karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi diiringi pula dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Jumasrah, 2018). Penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan dan hubungan yang positif antara lain Rustan A. (2013), Kresnandra (2016), Sasana (2016), Muryawan (2016) dan Anggarini (2017). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Investasi Swasta berpengaruh terhadap hubungan antara Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.

Semakin banyak perusahaan swasta asing dan perusahaan swasta dalam negeri menginvestasikan uangnya maka pendapatan asli daerah akan meningkat, dikarenakan banyaknya modal yang masuk kedalam pemasukan pendapatan asli daerah. Hal ini akan mempengaruhi meningkatnya lapangan kerja dan konsumsi masyarakat. Pola konsumsi menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan dan hubungan yang positif antara Gitaningtyas (2014), Maharani (2014), Saraswati (2018), Saputra (2018) dan Arini S. (2019). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis yang dihasilkan sebagai berikut:

H4 : Investasi Swasta berpengaruh terhadap hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dijelaskan dengan menekankan teori menggunakan variabel penelitian melalui data serta hasil statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Negara (www.djpk.depkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (www.jateng.bps.go.id).

Data berupa data *time series* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan data *cross-section* yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga merupakan data panel. Teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 yang memenuhi kriteria tertentu.

3.2 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang laporan keuangannya telah diaudit oleh BPK.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang data APBD nya telah masuk dalam website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Negara.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan data Investasi Swasta tahun 2015-2017 (data diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah).

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Pertumbuhan Ekonomi

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan *Gross National Product* (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat (Murni, 2006:173). Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator utama karena memberikan implikasi pada kinerja perekonomian makro yang lain. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dilihat dari perubahan relatif nilai riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 atas dasar harga konstan dan dinyatakan dalam satuan persen.

$$Gt = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Gt : Growth/Pertumbuhan Ekonomi
 PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
 PDRB_{t-1} : Produk Domestik Regional Bruto Tahun Lalu

Variabel Independen

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan serta kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun pengeluaran (expenditure assignment). Dalam penelitian ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan indikator pengeluaran pemerintah daerah. Indikator variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara realisasi total pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap realisasi total pengeluaran pemerintah provinsi dalam satuan persen.

$$DF = \frac{PPD}{TPProv} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- DF : Desentralisasi Fiskal
 PPD : Total Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 TPProv : Total Pengeluaran Pemerintah Provinsi

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017.

Variabel Moderating

Investasi Swasta

Investasi swasta merupakan realisasi penanaman modal swasta asing maupun swasta dalam negeri dan pembentukan modalnya dalam pengeluaran untuk membeli barang yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang. Pengukuran investasi swasta

diperoleh melalui penjumlahan (total) realisasi investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 dengan satuan rupiah.

$$\text{Investasi Swasta} = \text{PMA} + \text{PMDN} \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

- PMA : Penanaman Modal Asing
- PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada analisis kuantitatif yang merupakan analisis dengan perhitungan matematika atau statistika. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA), dengan bantuan program SPSS versi 25. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$PE = \alpha + \beta_1DF + \beta_2PAD + \beta_3IS + \beta_4DF.IS + \beta_5PAD.IS + e$$

Keterangan:

- PE = Pertumbuhan Ekonomi
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- DF = Desentralisasi Fiskal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- IS = Investasi Swasta
- e = Error Term

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini mencakup 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Penelitian ini menggunakan data time series selama 3 (tiga) tahun yaitu 2015-2017. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 35 Kabupaten/Kota x 3 tahun = 105 sampel. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terdapat beberapa data yang harus di outlier, dikarenakan data tersebut diatas standar deviasi atau data tersebut terlalu ekstrem, sehingga menjadi 102 sampel yang diolah.

Uji Normalitas

Pada penelitian ini menggunakan model CLT dengan sampel penelitian sebesar 102 kabupaten/kota. Model *Central Limit Theorem* menyatakan bahwa jika sampel yang diuji diatas atau sama dengan 30 ($n \geq 30$) maka distribusi sampel tersebut dianggap mengikuti normal. Jadi, dalam model CLT mayoritas ahli statistika menganggap sampel sejumlah 30 atau lebih sudah cukup besar untuk diasumsikan mendekati distribusi normal (Lind, 2014:300-301).

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
DF	0,570	1,755	Tidak terdapat multikolinearitas
PAD	0,565	1,769	Tidak terdapat multikolinearitas
IS	0,987	1,013	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Pada Tabel 1 untuk hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kesimpulan
DF	0,941	Tidak ada heterokedastisitas
PAD	0,311	Tidak ada heterokedastisitas
IS	0,539	Tidak ada heterokedastisitas
DF.IS	0,535	Tidak ada heterokedastisitas
PAD.IS	0,453	Tidak ada heterokedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 2 di atas, menunjukkan keseluruhan nilai signifikansi pada uji heterokedastisitas lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model	Hasil Durbin Watson	Kesimpulan
1	1,603	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,603 angka *DW* berada diantara -2 sampai +2. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sesuai dengan ketentuan Santoso (2012:242). Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). MRA digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen yang dalam hubungan tersebut terdapat faktor yang memperkuat atau memperlemah (variabel moderasi).

Tabel 4. Uji *Moderated Regression Analysis*

Variabel	Koefisien Reg	T _{hitung}	Sig.	Keterangan
Constant	4,949	26,755	0,000	
DF	0,018	0,824	0,412	H ₁ ditolak
PAD	9,900	2,384	0,019	H ₂ diterima
IS	6,001	1,236	0,219	
DF.IS	-4,543	-0,083	0,934	H ₃ ditolak
PAD.IS	-1,993	-1,032	0,305	H ₄ ditolak
R ² 0,151 Adjusted R ² 0,107 N 102		F _{hitung} 3,414 Sig. 0,007		

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PE = 4,949 + 0,018DF + 9,900PAD + 6,001IS - 4,543DF.IS - 1,993PAD.IS + e$$

Keterangan:

- PE = Pertumbuhan Ekonomi
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 DF = Desentralisasi Fiskal
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 IS = Investasi Swasta
 e = *Error Term*

Berdasarkan pengujian uji F pada tabel 5 yang menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 3,414 memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$. Hal ini berarti model regresi dalam penelitian ini telah *fit of goodness* yang menunjukkan bahwa variabel independen desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah dan variabel moderasi investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari pengujian koefisien determinasi (R^2) terdapat pada tabel 4 yang menunjukkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,107 atau 10,7% yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah dan investasi swasta sebesar 10,7%. Sedangkan sisanya yaitu 89,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4 diketahui bahwa DF memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,824 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,412 > 0,05$. Dengan demikian maka H₁ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal (DF) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Nilai koefisiensi β_1 sebesar 0,018 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,018.

Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi desentralisasi fiskal kurang maksimal dimana desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang

pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilisasi. Pihak pemerintah pusat juga mencanangkan program penguatan desentralisasi fiskal melalui perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang cukup besar, namun kondisi yang diharapkan berbanding terbalik dengan kenyataan. Keadaan tersebut justru membuat daerah ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Belum maksimalnya penerapan desentralisasi fiskal di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Young (2000), Lin dan Zou (2005), Saputra (2013), dan Yuskov (2015) yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4 diketahui bahwa PAD memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,384 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Dengan demikian maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Nilai koefisiensi β_2 sebesar 9,900 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 9,900. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Pada dasarnya peningkatan pendapatan asli daerah merupakan akses meningkatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga apabila terjadi peningkatan pendapatan asli daerah akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menggali potensi dan sumber daya yang dimiliki tercermin dengan melihat besaran pendapatan asli daerah yang dihasilkan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sehingga dengan tingginya pendapatan atau penerimaan suatu daerah mampu membiayai berbagai pengeluaran daerah serta pembangunan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Mukhtar (2015), Saraswati (2018), Jumasrah (2018), dan Arini S. (2019) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4 diketahui bahwa DF.IS memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,083 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,934 > 0,05$. Dengan demikian maka H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Investasi Swasta tidak mampu memoderasi hubungan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Nilai koefisiensi β_4 sebesar -4,543 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel interaksi desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -4,543. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal dan investasi swasta maka pertumbuhan ekonomi semakin menurun.

Peran pemerintah sangat penting terutama dalam hal merencanakan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam menghimpun dana untuk keperluan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Namun hal tersebut belum sesuai dengan keadaan di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan melihat di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora dan Kabupaten Tegal tidak melaporkan angka investasi swasta. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi dalam hal pengadaan modal investasi swasta

kurang maksimal, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Karena mengingat bahwa investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil temuan Jocas, Marques (2012) investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Timor Leste disebabkan oleh kualitas investasi tidak tepat pada sasaran pertumbuhan ekonomi serta arah investasi yang menitikberatkan pada pembiayaan negara. Penelitian yang sama antara lain Tandriawan, dkk. (2012), Rotinsulu dan Niode (2012) dan Kresnandra (2016).

Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 4 diketahui bahwa DF.IS memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,032 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,305 > 0,05$. Dengan demikian maka H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Investasi Swasta tidak mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Nilai koefisiensi β_5 sebesar -1,993 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel interaksi pendapatan asli daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -1,993. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah dan investasi swasta maka pertumbuhan ekonomi semakin menurun.

Pendapatan asli daerah di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata tinggi. Kondisi tersebut dapat diindikasikan sebagai kesiapan daerah dalam membiayai sendiri pembangunan yang juga merupakan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Namun jika melihat investasi swasta di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang bernilai rendah serta tidak melaporkan data investasinya dan nilai realisasi investasi swasta yang fluktuatif dengan melihat perbandingan data realisasi investasi swasta (PMA dan PMDN), hal tersebut dapat dikatakan salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya pungutan yang terjadi untuk melakukan investasi, selain itu faktor perijinan yang memakan waktu yang lama juga menyebabkan makin kurang berminatnya investor untuk menginvestasikan modalnya walaupun mekanisme pelayanan satu atap atau one stop service sudah diterapkan di hampir seluruh Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mukhtar (2015), Lebang (2017) dan Marlina AZ (2019) yang menemukan bahwa investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan investasi swasta sebagai variabel moderating. Maka dapat disimpulkan dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara simultan variabel desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah dan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara parsial variabel desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta variabel investasi swasta tidak mampu memoderasi pengaruh desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan diantaranya:

- a. Tahun pengambilan sampel yang hanya 3 tahun yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017 sehingga tingkat generalisasinya kurang baik.
- b. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat mewakili semua Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.
- c. Variabel independen dan variabel moderasinya hanya mengungkapkan 10,7% dari pengaruhnya terhadap variabel dependen, sehingga sisanya 89,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Saran

Atas dasar kesimpulan serta keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Periode waktu pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih di perpanjang untuk dapat mengetahui kecenderungan dalam jangka panjang.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel di luar Provinsi Jawa Tengah atau dapat menggunakan seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.
- c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti pengeluaran pemerintah, inflasi atau sumber penerimaan daerah lainnya.

Referensi

- Akai, Nobuo, Yukihiro Nishimura and Masayo Sakata. (2007). Complementarity, Fiscal Decentralization and Economic Growth, *Economics of Governance*. Heidelberg: Sep 2007. Vol. 8, Iss. , Page 339.
- Anggarini, Defia Riski. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2014. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung
- Arini S, Prima Rosita dan Manggar Wulan Kusuma (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *JRAMB Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta* Vol. 5, No. 1.
- Arsyad, Lincoln. (2004). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Keempat). Yogyakarta: STIE YKPN
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2014-2017. Diakses dari: <https://jateng.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2017). Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017. Diakses dari: <https://jateng.bps.go.id>
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Diakses dari: www.djpk.kemenkeu.go.id
- Ernita, Dewi, Syamsul Amar dan Efrizal Syofyan. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 1, No. 2.
- Febry, Chindy Rori, Antonius Y Luntungan, dan Audie O Niode. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001-2013. 16(2), Hal 243-254.
- Gitaningtyas, Y. K., dan Taufik Kurrohman. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).

- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hukubun, Mefi, Debby Rotinsulu dan Audie Niode. (2012). Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2002-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Jensen, M. C and Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure Journal of Financial Economic*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-306.
- Jumasrah. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Swasta, Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Tahun 2003-2016. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(2), 64-79.
- Kresnandra, Anak Agung Ngurah Agung. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Manajemen*, Vol. 3, No. 2.
- Kurniawan, Agus Indriatno, Theresia Militina dan Rahcma Budi Suharto. (2017). Pengaruh Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah Serta Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Journal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman INOVASI*, Vol.13 (2), Hal. 82-91.
- Kusaini, Muhammad. (2006), *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang: BPFE UNBRAW.
- Lebang, Irma Abigael, Debby Ch. Rotinsulu dan George M.V.Kawung. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bitung. *E-Journal UNSRAT*. Vol. 19, No. 1.
- Lind, Marchal and Wathen. (2014). *Statistical Techniques In Business and Economics*. Edisi 15. Jakarta: Salemba Empat.
- Maharani, Kurnia dan Sri Isnowati. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 21, No. 21, Hal 62-72.
- Malik, Shah Nawaz. (2006). Fiscal Decentralisation and Economic Growth in Pakistan. *The Pakistan Development Review*, 45: 4 part ii (Winter 2006).
- Marlina AZ, Siti dan Siska Pebrina. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi. *Journal of Economics and Business*, 3(1), Hal. 36-43.
- Martinez Vazquez, Jorge M. and McNab, R. (2001). Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Democratic Governance. *Working Paper*. Andrew Young School of Policy Studies, Oktober, 1-41.
- Miyasto, Lintangia Fajar Apriesta. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan. *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 2, No. 1, Hal. 1.
- Mukhtar, Afiah (2015), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Tahun 2003-2012. *Jurnal Economix* Vol. 3, No. 1.
- Murni, Asfiah. (2006). *Ekonomika Makro*. Bandung: Rafika Aditama.
- Muryawan, Sang Made dan Made Sukarsa. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 5.2, Hal. 229-252.

- Putra, Yosa Wijaya Adi. (2017). Pengaruh Investasi, Inflasi, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rustan A. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kaitannya Dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 9, No. 3.
- Santosa, Singgih. (2012). *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Saputra, Wiwit Edi. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1995-2015. *Skripsi*. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saraswati, Ida Ayu dan I Wayan Ramantha. (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 24, No. 1.
- Sasana, Hadi. (2015). Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Harga Di Provinsi Di Indonesia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 30, No. 1.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makroekonomi, Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, dan Widyanti. 2008. Indikator-Indikator Makroekonomi (Edisi 2). Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Sutawijaya, Adrian. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia. *Trikonomika*, Vol. 12, No. 1, Hal. 32–39.
- Tandiawan, Elvandry, Amran Naukoko dan Patrick Wauran. (2012). Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Manado Tahun 2001-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Taringan, Robinson. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Yang, Zhou. (2016). Tax Reform, Fiscal Decentralization, and Regional Economic Growth: New Evidence Form China. *Economic Modelling* 59, 520–528.
- Young. A. (2000). The Razot's Edge: Distortions and Incremental Refrom in the People's Republic of China, *Q. J. Econ.* 115 (4), 1091-1135.
- Yushkov, Andrey. (2015). Fiscal Decentralization And Regional Economic Growth: Theory, Empirics, And The Russian Experience. *Russian Journal of Economics* 1, 404–418.